

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PERIKANAN**

Jl. Raung 5A Sumenep Telp. (0328) 662891 Fax. (0328) 672484  
SUMENEP



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) merupakan satu kesatuan dari berbagai dokumen evaluasi kinerja baik itu evaluasi anggaran maupun evaluasi kinerja pemerintah sebagai pertanggung jawaban penggunaan sumber daya di dalam pelaksanaan pembangunan. Saat ini semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan harus dapat dipenuhi dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dengan peningkatan kinerja baik personal sampai dengan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan good governance yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dimaksud, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimana kauntabilitas bukan hanya sebatas penyajian Laporan LkjIP akan tetapi pertanggungjawaban terhadap kinerja perencanaan, anggaran dan juga sinergitas dan integritas kinerja didalam dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja. Tujuan dari diterbitkannya regulasi



tersebut adalah memberikan tanggung jawab terhadap pengguna sumberdaya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing.

Peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKjIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep ini bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja selama satu tahun anggaran;
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

## **3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI**

LKjIP merupakan suatu keseriusan pemerintah didalam menyajikan tarnsparansi dan akuntabilitas kinerja dalam bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan



memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Dinas Perikanan merupakan suatu organisasi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, dari perspektif organisasi mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi yang bersifat strategis. Lingkungan strategis yang dimaksud adalah :

- **Faktor Internal**

Kondisi faktor internal perairan Kabupaten Sumenep diartikan sebagai seluruh komponen kekuatan dan kelemahan yang sepenuhnya berada dalam pemberdayaan sumber daya perikanan. Bila seluruh komponen faktor internal dapat diberdayagunakan dengan baik, maka akan mampu memberikan dampak yang positif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani ikan.

Faktor internal sumberdaya perikanan sebagai unsur kekuatan meliputi luasnya perairan sekitar 50.000 km<sup>2</sup> dengan gugusan pulau sebanyak 126 pulau baik yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni, serta dukungan sarana dan prasarana penangkapan. Faktor internal sebagai kelemahan meliputi struktur alat tangkap yang masih di dominasi perikanan rakyat/tradisional serta keterbatasan sumber daya manusia baik aparatur maupun keterampilan nelayan dan petani ikan.

Selain itu didalam pengelolaan potensi perikanan yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan berkualitas, Dinas Perikanan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan sesuai dengan kewenangannya didukung oleh personil yang kompeten dibidang perikanan. Dari 37 pegawai ASN Dinas Perikanan terdapat 14 pegawai dengan kompetensi kelautan dan Perikanan selain itu dibantu dengan Petugas Penyuluh Bantu dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan di Kabupaten Sumenep sebanyak 19 orang.

- a. Unsur Kekuatan

Selain luas perairan Kabupaten Sumenep yang luas dan panjang pantai yang mempunyai panjang pantai sepanjang 577,76 km dimana Jumlah kecamatan pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep



sebanyak 20 Kecamatan dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Adapun potensi kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ Potensi Nelayan dan Perahu
  - Nelayan : 32.363 orang;
  - Perahu : 10.729 unit;
  - Tempat pelelangan Ikan (TPI) : 1 unit
- ✓ Potensi Garam
  - Petambak garam : 2.106 orang
  - Luas : 1.967,42 Ha
- ✓ Potensi Budidaya Ikan
  - Pembudidaya ikan : 1.546 orang
  - Luas rumput laut : 118.732 Ha
- ✓ Potensi Ekosistem Perikanan
  - Luas Mangrove : 11.844,80 Ha;
  - Luas Padang Lamun : 803,27 Ha;
  - Luas Terumbu Karang : 23.297,59 Ha.

Dengan melihat potensi tersebut diatas peluang pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Sumenep memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada dibawah lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dapat didorong untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten sumenep. Sampai saat ini produksi perikanan Kabupaten Sumenep masih sebagai pemasok terbesar di Provinsi Jawa Timur khususnya produk rumput laut dan produk hasil tangkap.

### b. Unsur Kelemahan

Kelemahan faktor internal peranan bidang perikanan terdapat pada sumber daya manusia masyarakat perikanan yang masih sangat terbatas baik dari kuantitas maupun dari sisi kualitas, karena rendahnya tingkat pendidikan dan tidak didukung permodalan dan manajemen yang baik serta masih minimnya alat tangkap yang digunakan. Ditambah lagi dengan masih minimnya penggunaan teknologi modern di dalam meningkatkan produksi perikanan. Disamping itu pembatasan kewenangan dalam pengelolaan potensi sangat terasa keterbatasan daerah dalam mengoptimalkan dan menciptakan inovasi dalam



pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pembatasan tersebut tertuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

### ▪ **Faktor Eksternal**

Komponen faktor eksternal merupakan kondisional yang keberadaannya di luar pengendalian manajemen.

#### a. Unsur Peluang

Potensi perikanan nasional cukup besar yaitu mencapai 65 juta ton sementara produksi perikanan secara nasional pada tahun 2021 baru menghasilkan 21,86 juta ton yang terdiri dari 14,64 juta ton hasil budidaya dan 6,76 juta ton hasil tangkapan atau masih terserap 33,6% dari potensi yang ada. Produksi sektor ekspor dari tahun ketahun semakin meningkat ini menandakan bahwa daya saing sektor perikanan juga meningkat.

Kabupaten Sumenep yang mempunyai luas laut sebesar  $\pm 50.000$  km<sup>2</sup> merupakan peluang yang cukup besar didalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Capaian produksi tahun 2022 yang mencapai lebih dari 728.77.,8 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 43.703,18 ton, produksi perikanan budidaya sebesar 685.067,62 mencerminkan bahwa potensi perikanan Kabupaten Sumenep sangat besar.

#### b. Unsur Ancaman

Ancaman faktor eksternal peranan bidang perikanan merupakan situasi dan kondisi di luar kemampuan pengendalian manajemen, namun kemampuan mengadaptasi dan beradaptasi terhadap kondisi dan situasi yang selalu berubah sehingga dapat dilakukan antisipasi, melalui cara dengan mengamati perubahan situasi dan kondisi secara sistematis dan mengevaluasi peluang dan ancaman berdasarkan pengalaman masa lalu. Karena dengan pemahaman yang baik akan dapat memperkecil segala resiko, namun demikian diambil manfaat bahwa ancaman faktor eksternal dapat dikatakan tidak berarti.

Disamping itu sektor perikanan secara nasional belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dimana kontribusi perikanan terhadap PDB nasional baru



sebanyak 3 persen. Ini membuktikan bahwa konsumsi masyarakat terhadap produk perikanan masih minim sehingga daya serap produksi perikanan tidak terdongkrak secara maksimal.

Kemudian dari sisi pemanfaatan teknologi dimana pelaku perikanan kabupaten sumenep masih banyak yang belum menggunakan dan memanfaatkan teknologi modern di dalam pengelolaan dan eksploitasi perikanan.

- **Faktor Kunci Keberhasilan**

- a. Meningkatkan dan mengembangkan usaha penangkapan ikan dan budidaya hasil perikanan;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian di bidang perikanan serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- c. Optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan kelautan dilakukan secara berkelanjutan;
- d. Peningkatan moral dan etos kerja masyarakat pesisir yang lebih berorientasi kepada budaya pembangunan berkelanjutan dan memacu terhadap akses modal, pasar, teknologi dan manajemen serta informasi;
- e. Menanamkan wawasan perikanan kepada masyarakat bahwa laut sebagai sumber kehidupan;
- f. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, penelitian dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah.
- g. Pemanfaatan teknologi modern ramah lingkungan di dalam meningkatkan produksi perikanan.

Kabupaten Sumenep merupakan satu wilayah paling timur dari Pulau Madura. Letak geografis Kabupaten Sumenep berada di antara 113° 32' 54" Bujur Timur hingga 116° 16' 48" dan 4° 55' Lintang Selatan hingga 7° 24' Lintang Selatan dengan batas wilayah di sebelah Utara Laut Jawa, di sebelah Timur Laut Jawa dan Flores, di sebelah Selatan Selat Madura dan di sebelah Barat Kabupaten Pamekasan.

Geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi 2 bagian yaitu Daratan dan Kepulauan, terdiri dari 27 wilayah Kecamatan, 328 Desa dan 4 Kelurahan. Bagian Daratan luasnya 1.146,93 km<sup>2</sup> atau sekitar 54,79%, sedangkan wilayah Kepulauan luasnya 946,53 km<sup>2</sup> atau sekitar 45,21%.



Luas perairannya  $\pm 50.000 \text{ km}^2$  dengan gugusan pulau sebanyak 126 pulau, yang berpenghuni sebanyak 48 pulau dan 78 pulau tidak berpenghuni dengan panjang pantai 577,76 km serta jumlah Desa berpantai 140 Desa. Pulau yang paling Timur wilayah Kabupaten Sumenep adalah Pulau Sakala Kecamatan Sapeken berjarak  $\pm 165$  mil laut dan paling Utara Pulau Karamean Kecamatan Masalembu berjarak  $\pm 151$  mil laut dari Kecamatan Kalianget.

Dengan segenap potensi sumberdaya alam dan jasa kelautan yang terkandung didalamnya dan pemanfaatan yang masih sangat terbatas membuat wilayah laut beserta potensi yang dimiliki Kabupaten Sumenep justru menimbulkan permasalahan antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasana penegakan hukum dilaut menyebabkan intensitas dan monitoring serta pengawasan menjadi kurang efektif sehingga masih sering terjadi penangkapan ilegal dan bentrok antar nelayan;
2. Keterbatasan dalam teknologi kelautan termasuk teknologi informasi secara keseluruhan menyebabkan sumberdaya yang tersedia tidak dapat teridentifikasi secara memadai;
3. Terbatasnya sumberdaya manusia kelautan dan perikanan merupakan kendala tersendiri yang harus segera dibenahi karena rata-rata masih mengenyam pendidikan rendah;

Seiring laju pertumbuhan penduduk dan berbagai kepentingan, keberadaan ekosistem perairan diantaranya kawasan mangrove, padang lamun dan terumbu karang bertambah mendapat tekanan sehingga apabila tidak diantisipasi lebih dini dikawatirkan sumberdaya kelautan dan perikanan serta jasa-jasa terkait didalamnya akan terganggu.

#### **4. GAMBARAN UMUM**

##### **a) Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 102 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tat Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep disebutkan bahwa Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan yang dipimpin





oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah.

### **b) Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 102 Tahun 2021 dengan fungsi menyelenggarakan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perikanan serta melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan keuangan, pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum dan kepegawaian, serta program perencanaan pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. Penetapan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap;
- c. Penetapan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran perikanan;
- d. Penetapan kebijakan teknis perikanan budidaya;
- e. Penetapan kebijakan teknis pengawasan sumber daya perikanan perikanan;
- f. Penetapan kebijakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **5. DASAR HUKUM**

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah:

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021 – 2026;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 12) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
- 13) Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis di Kabupaten Sumenep.

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolak ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam RPJMD tersebut meliputi visi, misi, tujuan serta strategi pokok pembangunan adalah sebagai berikut :

##### 1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksikan cita-cita yang ingin dicapai dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep merupakan salah satu institusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, maka secara logis visinya merupakan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu :

*"Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera "*



### 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan maka perlu merumuskan Misi yang menggambarkan upaya untuk mencapai penggalan cakupan dari visi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Membangun kualitas Sumber daya Manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
2. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan daru hulu ke hilir;**
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat;
4. Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan berkearifan lokal;
5. Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Misi Kabupaten Sumenep yang telah dirumuskan pada Misi II **“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan daru hulu ke hilir”** perlu diterjemahkan dalam bentuk Tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yaitu *“Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”*

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan secara terukur dan nyata dalam jangka waktu tahunan atau bulanan. Fokus utama Sasaran adalah tindakan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep merumuskan pada Sasaran yang menggambarkan upaya untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.**

## B. PERENCANAAN KINERJA ORGANISASI

Perencanaan Kinerja Organisasi merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2023 yang



telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 dengan mendasarkan :

**Tabel 2.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TARGET	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatnya nilai tambah sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan	4%	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b><ul style="list-style-type: none"><li>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</li></ul></li><li><b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b><ul style="list-style-type: none"><li>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</li><li>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</li></ul></li><li><b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b><ul style="list-style-type: none"><li>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li></ul></li></ol>	<b>3.192.762.079</b> 3.192.762.079 <b>4.975.147.556</b> 2.805.512.200 2.169.635.356 <b>2.960.647.217</b> 2.960.647.217



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada ketentuan Permenpan RB tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selain itu telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimana dengan peraturan tersebut menjamin pelaksanaan program dan kegiatan bukan hanya berbasis kinerja namun harus terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun sebelumnya. Disamping itu evaluasi kinerja bukan hanya sebatas pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Daerah, akan tetapi capaian kinerja harus juga diukur sampai dengan level individu, sehingga diharapkan capaian kinerja diperoleh secara berjenjang, berintegrasi dan akuntabel. Pencapaian *output*, *outcome* dan *impact* benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu dalam regulasi tersebut fungsi pengawasan sebagai penanggungjawab terhadap konsistensi target kinerja terhadap capaian kinerja telah diperkuat dan dipertajam.

Disamping itu pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang merupakan pedoman operasional di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap sasaran dan tujuan OPD. Gambaran tersebut terlihat jelas bagaimana tingkat kinerja masing-masing OPD didalam melaksanakan program dan kegiatan, kendala dan permasalahan yang terjadi, solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut serta proyeksi kedepan dalam mencapai



sasaran dan tujuan Renstra dan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

**3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari sasaran strategis yang diperjanjikan, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja atas target kinerja sasaran maupun tujuan. Adapun Realisasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	%	4	BPS	BPS

**3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2  
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	4	5
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	4%		14,8%	BPS

**3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Akhir yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir RPJMD



Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	4,5 %	BPS	BPS

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

-

### 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Tahun 2023;

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai tambah sub sektor perikanan” dicapai dengan mengukur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku (PDRBHB) sub sektor perikanan tahun 2021 dan tahun 2022. Dimana nilai tambah sub sektor perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp. 5.681.638 (juta) dan pada tahun 2022 mencapai Rp. 6.522.796 (juta) sehingga laju pertumbuhan nilai tambah subsektor perikanan mencapai 14,8%. Sedangkan pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan tahun 2023 sampai dokumen ini disusun masih menunggu hasil publikasi data dari Badan Pusat Statistik.

Pencapaian kinerja pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan pada tahun 2023 didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023**

No.	Program	Realisasi	Ket.
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.364.123.333	APBD DAN DAK
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.890.865.400	APBD DAN DAK
4	Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan	2.926.333.856	DAK
	<b>Total</b>	<b>10.181.322.589</b>	





Keberhasilan tersebut dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Tercapainya target produksi perikanan terutama produksi perikanan tangkap dan produksi rumput laut yang merupakan komoditas pendorong pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan
2. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan baik budidaya dan perairan umum.
3. Pembinaan dan pelatihan terhadap lembaga/kelompok perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta ditunjang dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang undangan tentang perikanan;
4. Semakin beragamnya hasil produk olahan perikanan sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat;
5. Hadirnya investasi bidang perikanan Kabupaten Sumenep sehingga nilai jual hasil perikanan dapat meningkat.

Indikator sasaran strategis pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan dapat tumbuh positif ditunjang oleh indikator program dengan target indikator tahun 2023 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Produksi Perikanan

Program pendukung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program tersebut dilaksanakan dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun pencapaian kinerja indikator hasil perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 43.703,18 ton dan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 44.377,63 ton sehingga pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 1,54% dari target sebesar 1% dengan capaian kinerja sebesar 154%. Meskipun didalam pencapaian kinerja peningkatan pertumbuhan produksi perikanan tangkap tumbuh positif ada beberapa kendala yang masih menjadi hambatan didalam pencapaian kinerja yang bisa lebih baik diantaranya :



- a) Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan bagi nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan;
- b) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern ramah lingkungan yang masih belum optimal;
- c) Masih minimnya hasil produksi perikanan dari hasil penangkapan ikan di perairan umum;

Dari kendala diatas diharapkan adanya solusi yang dapat dilakukan sehingga target kinerja dapat ditingkatkan. Adapun solusi yang akan dilakukan diantaranya :

- a) Penggunaan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan dapat dioptimalkan sehingga ketergantungan terhadap cuaca dapat di minimalisir serta dengan adanya penggunaan teknologi modern ramah lingkungan efektivitas penangkapan ikan dapat ditingkatkan. Disamping itu jangkauan tangkapan ikan nelayan dapat ditingkatkan dari sebelumnya;
- b) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap produksi perikanan terutama di perairan umum.
- c) Lebih aktif dan intensifnya Pemerintah Daerah didalam melakukan intervensi program dan kegiatan bidang perikanan tangkap kepada nelayan.

### 2) Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya

Capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tahun 2023 yaitu pertumbuhan produksi perikanan budidaya terdiri dari budidaya ikan diluar komoditi non ikan/rumput laut dan garam. Capaian kinerja dari Hasil Perikanan Budidaya dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Dari program tersebut diatas diperoleh realisasi capaian kinerja jumlah hasil produksi budidaya tahun 2022 sebesar 7.802,8 ton dan hasil produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 7.477,38 ton sehingga pertumbuhan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar – 4,17% dari target sebesar 17%. Capaian pertumbuhan produksi perikanan budidaya yang negatif di pengaruhi beberapa kendala diantaranya :



- a) Serangan penyakit ikan terutama pada komoditas udang vanamei sehingga berpengaruh pada produktifitas produksi;
- b) Serangan penyakit juga dipengaruhi oleh rusaknya ekosistem/lingkungan akibat pembuangan limbah hasil aktifitas budidayai ikan tanpa melalui sistem pengolahan limbah yang layak;
- c) Menurunnya harga komoditas perikanan budidaya menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pembudidayaan ikan;

Untuk mengatasi kendala diatas Dinas Perikanan telah melakukan langkah – langkah penanganan/solusi diantaranya :

- a) Melakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan dalam penanganan penyakit ikan;
- b) Melakukan koordinasi secara intens dengan stake holder dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat dari aktivitas pembudidaya ikan;
- c) Melakukan pembinaan kepada kelompok terkait dengan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen budidaya ikan.

### 3) Pertumbuhan Produksi Olahan Perikanan

Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan di dukung oleh program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dari program tersebut capaian produksi perikanan olahan perikanan pada tahun 2022 sebesar 21.507,33 ton dan capaian produksi olahan perikanan pada tahun 2023 sebesar 39.156 ton sehingga pertumbuhan produksi olahan perikanan pada tahun 2023 mencapai 82,05% dari target sebesar 1,5%.

Pencapaian ini didukung keberhasilan beberapa faktor diantaranya :

- a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan yang dimiliki oleh masyarakat;
- b) Semakin terbukanya akses pasar terhadap hasil olahan perikanan;

- c) Hadirnya investasi bidang perikanan Kabupaten Sumenep sehingga nilai jual hasil perikanan dapat meningkat.

### 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;

Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan evaluasi dalam bentuk tabel sebagai berikut :

#### **Cost Per Outcome**

- a. Alokasi per Sasaran Pembangunan

**Tabel 3.5  
Alokasi per Sasaran Pembangunan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	17.390.000.373	15.116.272.784	86,93	13,07

- b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIEN (%)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	BPS*	86,93	-

\*menunggu Data Dari BPS

### 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja;

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2021, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.7  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	KINERJA			ANGGARAN	REALISASI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1 <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> - Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1%	1,54%	154	3.192.762.079	2.364.123.333
2 <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b> - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	17%	-4,17%	-123	4.975.147.556	4.890.865.400
3 <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b> - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaOptim alisasi usaha pemanfaatan ikan	Persentase pertumbuhan produksi olahan perikananb	1,5%	82,05%	5470	2.960.647.217	2.926.333.856
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>11.128.556.852</b>	<b>10.181.322.589</b>

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan**

Indikator kinerja sasaran adalah Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan.

Target : 4 %;

Realisasi : BPS;

Capaian : %.

Keberhasilan tersebut dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Tercapainya target produksi perikanan terutama produksi perikanan tangkap dan produksi rumput laut yang merupakan komoditas pendorong pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan
2. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan baik budidaya dan perairan umum.



3. Pembinaan dan pelatihan terhadap lembaga/kelompok perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta ditunjang dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang undangan tentang perikanan;
4. Semakin beragamnya hasil produk olahan perikanan sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat;
5. Hadirnya investasi bidang perikanan Kabupaten Sumenep sehingga nilai jual hasil perikanan dapat meningkat.

Program pendukung indikator kinerja diantaranya :

### 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program tersebut dilaksanakan dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pencapaian kinerja indikator hasil produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 44.377,63 ton dari target 44.126 ton (100,5%), sehingga tercapainya target persentase indikator program terhadap pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 1,54% dari target 1% (154%). Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

- Penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern ramah lingkungan yang optimal;
- Meningkatnya hasil produksi perikanan dari hasil penangkapan ikan di perairan umum;
- Pelatihan kepada nelayan untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Kegiatan pendukung dari program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan adalah memberikan perlindungan terhadap usaha pelaku perikanan sehingga dapat meminimalisir kerugian yang lebih besar serta memberikan fasilitasi dalam hal mendapatkan sertifikat tanah nelayan. Tujuan



dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan perlindungan terhadap usaha pelaku perikanan dan nelayan.

### **Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.192.762.079,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.364.123.333,- atau mencapai 74,04%.

### **Bentuk Kegiatan dan Lokasi Kegiatan**

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa :

1. Penyaluran sarana penangkapan ikan berupa jangjarn millenium yang diserahkan kepada 1 kelompok sebanyak 1 paket di kecamatan Talango;
2. Penyaluran *Global Position System (GPS)* dan *Fish Finder* kepada 4 kelompok di kecamatan Dungkek sebanyak 4 paket;
3. Penyaluran mesin perahu 23-24 PK kepada 4 kelompok masing – masing sebanyak 1 paket di kecamatan Pragaan;
4. Penyaluran prasarana penangkapan ikan berupa mini coolbox kepada 6 kelompok masing – masing sebanyak 1 paket di kecamatan Gayam;
5. Penyaluran paket pancing ulur kepada 4 kelompok masing – masing sebanyak 1 paket di kecamatan Arjasa;
6. Penyaluran perahu fiber dibawah 5 GT kepada 6 kelompok masing –masing sebanyak 1 paket di kecamatan Sapeken;
7. Penyaluran sarana penangkapan ikan kepada 1 kelompok dikecamatan Kangayan.
8. Pembangunan jalan lingkungan untuk kampung nelayan di Kecamatan Arjasa

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program tersebut dilaksanakan dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pencapaian kinerja indikator hasil produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 7.477,38 ton dari target 6.318 ton (118,3%), akan tetapi target persentase indikator program terhadap



pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar -4,17% dari target 17%. ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

- d) Serangan penyakit ikan terutama pada komoditas udang vanamei sehingga berpengaruh pada produktifitas produksi;
- e) Serangan penyakit juga dipengaruhi oleh rusaknya ekosistem/lingkungan akibat pembuangan limbah hasil aktifitas budidayai ikan tanpa melalui sistem pengolahan limbah yang layak;
- f) Menurunnya harga komoditas perikanan budidaya menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pembudidayaan ikan;

Kegiatan pendukung dari program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai berikut :

### a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan usaha budidaya perikanan serta perlindungan terhadap pembudidaya.

Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah peningkatan usaha budidaya serta terjaminnya perlindungan pembudidaya perikanan.

#### **Anggaran dan Realisasi**

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.169.635.356,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.152.630.986,- atau mencapai 99,26%.

#### **Bentuk dan Lokasi Kegiatan**

Bentuk kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan ini dilaksanakan Berupa :

- a. penyaluran hibah berupa paket budaya lobster air tawar kepada 2 kelompok masing masing sebanyak 1 paket di kecamatan Bluto dan kecamatan Kota Sumenep;
- b. Penyaluran hibah paket budidaya lele kepada 8 kelompok masing – masing sebanyak 1 paket di kecamatan Dungkek, kecamatan Lenteng, kecamatan Ganding, kecamatan Gapuran, kecamatan Kota dan kecamatan Ganding.





- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok perikanan dalam rangka pengawasan mutu perikanan serta penguatan kelembagaannya. Disamping itu dilakukan sosialisasi terkait pentingnya variasi dan gizi menu berbahan dasar ikan untuk membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Sumenep.

### b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah penyediaan dan penyaluran bantuan sarana dan prasarana budidaya beserta pendukungnya yang didanai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan produksi budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Anggaran dan Realisasi**

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.805.512.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.738.234.414,- atau mencapai 97,60%.

#### **Bentuk dan Lokasi Kegiatan**

Bentuk dan lokasi kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penyaluran Sarpras Budidaya Udang Vanamei yang diberikan kepada 4 kelompok di Kecamatan Arjasa, Giligenting dan Saronggi;
2. Penyaluran Sarpras Budidaya Rumput Laut yang diberikan kepada 7 kelompok di Kecamatan Raas, Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Sapeken;
3. Penyaluran Sarpras ikan kerapu yang diberikan kepada 5 kelompok di Kecamatan Raas dan Sapeken;



4. Penyaluran sarpras budidaya ikan nila yang diberikan kepada 4 kelompok di Kecamatan Raas, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Sapeken da Kecamatan Kalianget.

### 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program tersebut dilaksanakan dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pencapaian kinerja indikator hasil produksi olahan perikanan tahun 2023 sebesar 39.156 ton dari target 21.207,33 ton sehingga tercapainya target persentase indikator program pertumbuhan produksi olahan perikanan sebesar 82,05% dari target 1,5%.

Pencapaian ini didukung keberhasilan beberapa faktor diantaranya :

- d) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan yang dimiliki oleh masyarakat;
- e) Semakin terbukanya akses pasar terhadap hasil olahan perikanan;
- f) Hadirnya investasi bidang perikanan Kabupaten Sumenep sehingga nilai jual hasil perikanan dapat meningkat.

Kegiatan pendukung dari program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan optimalisasi usaha pemanfaatan ikan adalah bagaimana masyarakat nelayan mendapatkan sarana didalam pemanfaatan dan peningkatan kualitas hasil perikanan. Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah diharapkan dengan adanya edukasi, pelatihan dan sarana yang didapatkan dapat meningkatkan nilai tambah terhadap pendapatan nelayan serta meningkatkan daya saing hasil produksi perikanan.



### **Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.960.647.217,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.926.333.856,- atau mencapai 98,84%.

### **Bentuk Kegiatan dan Lokasi Kegiatan**

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan berupa :

- a. Perbaikan mesin produksi pada fasilitas *Integrated Cooling System (ICS)* yang ada di Kecamatan Dungkek;
- b. Penyaluran Sarana dan prasarana serta rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) kepada 8 kelompok di Kecamatan Saronggi, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Giligenting;
- c. Perbaikan dan Pembangunan Pasar Ikan di 4 Lokasi di Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batang-batang dan Kecamatan Saronggi;
- d. Penyaluran sarana dan prasarana alat pengolahan bakso kepada 3 kelompok di Kecamatan Lenteng, Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Gulug-guluk.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **1. Belanja Operasi dan Belanja Modal**

Untuk alokasi dan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :



**Tabel 3.8**  
**Belanja Daerah**

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	<b>Belanja Daerah :</b>			
	Belanja Operasi	14.559.658.744	11.249.580.924,-	<b>89,34</b>
	Belanja Modal	2.830.341.629	2.108.450.126,-	<b>74,5</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.390.000.373</b>	<b>15.116.272.784</b>	<b>86,93</b>

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Belanja Dinas Perikanan Tahun 2023**

KODE	SASARAN DAN RENCANA AKSI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.390.000.373</b>	<b>15.116.272.784</b>	86,93
<b>325.30101.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.261.443.521</b>	<b>1.326.493.326</b>	78,81
325.30101.01.20	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.321.300	6.220.600	98,41
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.568.300	4.496.100	98,42
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.753.000	1.724.500	98,37
325.30101.01.20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.973.000	26.880.000	99,86
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.973.000	26.880.000	99,86
325.30101.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.285.425.380	4.018.754.035	76,03
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.280.914.180	4.014.482.035	76,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.511.200	4.272.000	94,70
325.30101.01.20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.681.856	290.943.439	89,61
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.132.046	10.087.110	99,56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.033.150	68.492.400	97,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.136.160	40.111.645	92,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.274.500	44.486.000	61,55



KODE	SASARAN DAN RENCANA AKSI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.106.000	127.766.284	98,96
325.30101.01.20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.288.890	485.593.076	95,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.087.640	275.099.576	93,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.201.250	210.493.500	98,73
325.30101.01.20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.753.095	106.559.045	96,21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.510.400	86.186.145	96,29
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.242.695	20.372.900	95,91
<b>325.30101.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.192.762.079</b>	<b>2.364.123.333</b>	<b>74,05</b>
325.30101.03.50	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.192.762.079	2.364.123.333	74,05
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.192.762.079	2.364.123.333	74,05
<b>325.30101.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>4.975.147.556</b>	<b>4.890.865.400</b>	<b>98,31</b>
325.30101.04.50	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.805.512.200	2.738.234.414	97,60
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.805.512.200	2.738.234.414	97,60
325.30101.04.50	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.169.635.356	2.152.630.986	99,22
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.480.535.140	1.469.590.766	99,26
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	689.100.216	683.040.220	99,12
<b>325.30101.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>2.960.647.217</b>	<b>2.926.333.856</b>	<b>98,84</b>
325.30101.06.50	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.960.647.217	2.926.333.856	98,84
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.960.647.217	2.926.333.856	98,84



- Sumber dana :

**Tabel 3.10**  
Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI
APBD	9.536.583.029	8.155.834.073
DAK	7.853.417.344	6.960.438.711
<b>TOTAL</b>	<b>17.390.000.373</b>	<b>15.116.272.784</b>




## BAB IV PENUTUP

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab, transparan dan efektif. Disamping itu merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap visi dan misi Kabupaten Sumenep sebagai pertanggung jawaban Pemimpin Daerah terhadap kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Pencapaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2023 dapat dicapai dengan baik yang ditandai dengan pemenuhan target capaian kinerja secara makro maupun mikro yang telah disusun didalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang sangat menonjol dan membutuhkan perhatian lebih serius sehingga diharapkan kedepan didapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Evaluasi sangat perlu dilakukan pada setiap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan terutama program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahan evaluasi ini nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Sumenep, Januari 2024  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SUMENEP  
  
**Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660808 198603 1 005